

**KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN BKKBN
DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DIKELURAHAN KORPRI JAYA SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

Irwan Setiawan

1741020064

Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN BKKBN
DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DIKELURAHAN KORPRI JAYA SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

Irwan Setiawan

1741020064

Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Dr. Jasmadi, M.Ag

Pembimbing II : M. Apun Syarifuddin, S.Ag, M.Si

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan menjadi isu yang sangat populer juga mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia, berdasarkan hasil riset *Worldometer*. Dari fenomena tersebut maka pemerintah berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara membentuk Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) di setiap kecamatan memiliki satu Kampung KB, salah satu adalah kampung KB Sakura yang ada di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame.

Penulis mengadakan penelitian mengenai Bagaimana kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat melalui kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konsling Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ?, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat melalui kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konsling Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung !. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 8 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan metode induktif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapat temuan sebagai berikut : yang *pertama* adalah penyuluhan kepada masyarakat yang berdampak pada kesadaran masyarakat dan pembentukan Kampung KB di Kelurahan Korpri Jaya, *kedua* yaitu pendampingan masyarakat dengan membentuk rencana kegiatan dan menjalankan kegiatan seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konsling Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia), yang *ketiga* yaitu kemandirian masyarakat dimana pada tahap ini masyarakat sudah mencoba atau mengikuti program pemerintah untuk mengatur jarak kelahiran, masyarakat juga sudah faham tentang tumbuh kembang balita, remaja dan psikologi lansia, selain itu di tingkat remaja sudah terbentuk PIK Remaja dimana anak-anak remaja bisa saling berkonsultasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi.

Kata kunci : kampung KB dan pemberdayaan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Setiawan
NPM : 1741020064
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Kemitraan Antara Masyarakat Dengan Bkkbn Dalam Pengembangan Masyarakat Dikelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak mengisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan

Irwan Setiawan
NPM. 1741020064



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721) 78088

PERSETUJUAN

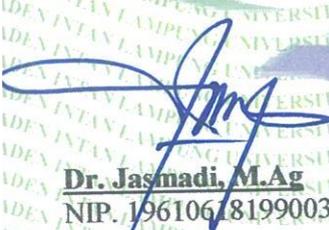
Judul : KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN BKKBN
DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DIKELURAHAN KORPRI JAYA SUKARAME KOTA
BANDAR LAMPUNG

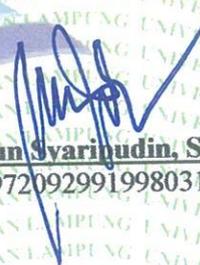
Nama : Irwan Setiawan
Npm : 1741020064
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah
dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Mei 2022
Pembimbing I
Pembimbing II


Dr. Jasmadi, M.Ag
NIP. 196106181990031003


M. Apun Syarifudin, S.Ag. M.Sos.I
NIP. 1972092991998031003

Mengetahui
Ketua Jurusan PMI


Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 196508171994031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

PENGESAHAN

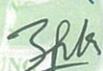
Skripsi dengan judul “KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN BKKBN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KORPRI JAYA SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG”, disusun oleh: **Irwan Setiawan, NPM: 1741020064, Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: 20 April 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. H. Mansur Hidayat.M.Sos.I


(.....)

Sekretaris : Evi Fitri Aglina, M.Pd


(.....)

Penguji I : Hj. Mardiyah, S.Pd., M.Pd


(.....)

Penguji II : Dr. Jasmadi, M.Ag


(.....)

Penguji III : M. Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si.


(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi


Dr. Abdul Syukur, M.Ag.
NIP. 1965110119950310001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

“QS. An-Nisa: 9”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah doa teriring salam tercurahkan segala rasa syukur puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua umat, berkat pertolongan dan Ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tak lupa sholawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi Kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada Almarhum Ayahandaku Wagino dan Almarhumah ibundaku Sutriyani binti Tulus
2. Kedua adik ku Farid Habibi dan Ferli Armando
3. Saudara/i sepupu ku Youga Bagas, Lenny Apriliyani, Benny Kurniawan, Rendi Kurniawan, Selly Novalia Putri, Eko Prasetio, Andhika Ryo Saputra
4. Orang yang tersayang Rezillah
5. Teman-teman PMI C, Riskanata, Mas'ud, Aldi Wijaya, Deni Saputra, M. Rizki Pandu, Syarif Hidayatullah, Adam Ardiansyah, Irfan Kurniawan, M. Ikhsan, Rusdi.

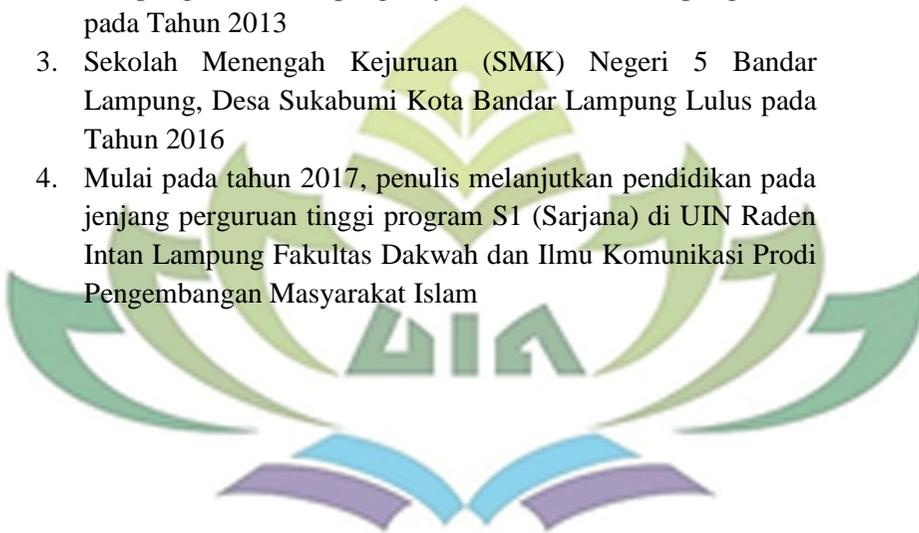
Kebangaan kampus hijau tercinta bisa memakai Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang akan selalu terkenang karena menyimpan perjalanan yang terindah.

RIWAYAT HIDUP

Irwan Setiawan, dilahirkan di Bandar Lampung Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 November 1998, anak Pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan ibu Sutriyani dan Bapak Wagino.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukabumi, Desa Rupi Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2010
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 31 Bandar Lampung, Desa Campang Raya Kota Bandar Lampung Lulus pada Tahun 2013
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Bandar Lampung, Desa Sukabumi Kota Bandar Lampung Lulus pada Tahun 2016
4. Mulai pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi program S1 (Sarjana) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



KATA PENGHANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan manusia untuk selalu menggali ilmu Agama dan pengetahuan dan dengan rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “Kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung” Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat berjasa. Untuk itu terimakasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan serta Bapak H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I selaku Sekretaris Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Jasmadi, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Apun Syaripudin, S.Ag. M.Sos.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis
6. Pihak perpustakaan Pusat dan juga Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi pada penulis.
7. Bapak Lurah Kelurahan Korpri Jaya beserta seluruh perangkat Kelurahan.
8. Pembina serta seluruh Kader Kampung KB Sakura

Akhirnya ungkapan Do'a terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moril maupun materil berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Irwan Setiawan
NPM. 1741020064



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGHANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematikan Pembahasan.....	18
BAB II KEMITRAAN MASYARAKAT DENGAN BKKBN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	
A. Kemitraan.....	21
1. Pengertian Kemitraam	21
2. Tujuan Kemitraan	26
B. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	27
1. Pengertian BKKBN.....	27
2. Kampung Keluarga Berencana	29
3. Tujuan dan Sasaran Kampung KB	30

C. Pengembangan Masyarakat.....	33
1. Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	33
2. Perinsip Pengembangan Masyarakat	34
3. Tujuan Pengembangan Masyarakat	35
4. Model-model Pengembangan Masyarakat	36
5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	38
BAB III GAMBARAN KELURAHAN DAN KEMITRAAN	
MASYARAKAT DENGAN BKKBN	
A. Profil Kelurahan Korpri Jaya.....	41
1. Sejarah Kelurahan.....	41
2. Kondisi Geografis dan Demografis	44
3. Kondisi Sosial Ekonomi	46
4. Kondisi Sosial Budaya.....	48
5. Kondisi Sosial Agama	49
B. Kampung Keluarga Berkualitas (KB).....	51
1. Sejarah Kampung KB Sakura.....	51
2. Visi, Misi dan Tujuan Kampung KB Sakura.....	53
3. Susunan Kepengurusan Kampung KB Sakura	54
C. Kemitraan Masyarakat Dengan BKKBN.....	56
1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	56
2. Pendampingan Kader Kepada Masyarakat.....	61
3. Kemandirian Masyarakat	68
BAB IV KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN	
BKKBN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	
A. Kemitraan Masyarakat Dengan BKKBN.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR RUJUKAN	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Data Nama Lurah Kelurahan Korpri Jaya	43
2. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
3. Data Penduduk Berdasarkan Usia	46
4. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	47
5. Data Penduduk Berdsarkan Pendidikan.....	47
6. Data Penduduk Berdsarkan Agama.....	49
7. Data Tempat Ibadah	50



DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kelurahan	44
2. Struktur Kepengurusan Kampung KB Sakura	55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Panduan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
3. Instrumen Penelitian
4. Hasil Turnitin
5. Kartu Konsultasi Skripsi
6. Kartu Hadir Munaqasyah
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Penelitian Dari Kelurahan Korpri Jaya
9. Surat Keterangan Pergantian Judul Skripsi
10. Surat Keputusan Tentang Judul Skripsi
11. Surat balasan dari kelurahan korpri jaya
12. Surat Keterangan Walikota Tentang Kampung KB



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi yang peneliti tulis. Adapun judul skripsi ini ialah “**Kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat di kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung**” Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian dan maksud dari judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Kemitraan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kemitraan adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹ Kemitraan berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan juga di indentikan dengan proses sosial yang paling dasar. Biasanya kemitraan melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan dan merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.²

Menurut Tugimin dalam kerjasama atau kemitraan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan melakukan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.³

Dalam penemuan menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara kedua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam suatu kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya akan tetapi membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya

¹Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: B umi Aksara, 1994), h. 156

²*Ibid.*, h. 159

³Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004), h. 7

berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam suatu pembangunan guna kesejahteraan rakyat.⁴

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab “*syaraka*” yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Menurut *Karl Marx*, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.⁵ Menurut *Emile Durkheim*, masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.⁶

Menurut *Ralph Linton*, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁷ Sedangkan menurut *Selo Soemardjan*, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.⁸

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu lembaga non kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri

⁴Jeane neltje saly *usaha kecil, penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional*, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001), h. 35

⁵ Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial, Volume 1, Januari 2020, h. 164

⁶ Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Ibid.*, h. 164

⁷ Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Ibid.*, h. 165

⁸ Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Ibid.*, h. 165

yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.⁹ Tugas BKKBN tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan BKKBN adalah pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang) sebagai unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi tersebut.¹⁰

Dari beberapa uraian di atas, yang dimaksud dengan Kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan memiliki interaksi sosial, yang bekerja sama dengan pihak BKKBN dengan membentuk suatu kader atau tenaga sukarela yang berupaya menjalankan tugas-tugas BKKBN sehingga masyarakat atau keluarga yang ada di kelurahan Korpri Jaya menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang maju, keluarganya mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal.

Pengembangan masyarakat (*community development*) dalam bahasa Arab disebut dengan *tathwirul mujtamã il-islamiy* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.¹¹

Pengembangan Masyarakat merupakan sebuah proses peningkatan kualitas hidup melalui individu, keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan diri dalam pengembangan potensi dan skill, wawasan dan sumber daya yang

⁹Pedoman Pengelolaan Kampung KB, *Dokumentasi*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, h. 2

¹⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia No 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

¹¹Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, cet. Ke II (Jakarta: CSD, 2008), h. 33

ada untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan mengenai kesejahteraan mereka sendiri sesuai dengan petunjuk petunjuk Islam.¹²

Dari beberapa istilah diatas maksud dari study ini tentang kemitraan yang di lakukan oleh BKKBN dengan masyarakat Kelurahan Korpri Jaya adalah bekerja sama dengan masyarakat dengan tujuan membentuk keluarga yang berkualitas yaitu keluarga yang sejahtera, keluarga yang sehat, keluarga yang maju, keluarga yang mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, mempunyai wawasan luas, dan bertanggung jawab, untuk mencapai itu semua maka di terapkan Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) yang dilakukan oleh kader-kader BKKBN melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pelayanan Informasi dan Konsling Remaja (PIK-R).

B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan menjadi isu yang sangat populer juga mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia, berdasarkan hasil riset *Worldometer* yang mendapatkan data dari berbagai sumber di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Health Organization* (WHO), *Food and Agriculture Organization* (FAO), dan *OECD* bahwa Indonesia menduduki peringkat ke empat dunia dengan jumlah penduduk mencapai 277.858.332 jiwa.¹³

Sejak Provinsi Lampung terbentuk pada tahun 1964, jumlah penduduk Lampung terus mengalami perkembangan. Hasil SP2020 mencatat penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 1,40 juta penduduk di bandingkan hasil

¹² Kamaluddin, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, Jurnal Hikmah, vol VIII, No 02 Juli 2014

¹³ Virdita Ratriani, 20 Negara Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia, (online) <https://caritahu.kontan.co.id/news/20-negara-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-berapa-jumlah-penduduk-indonesia?page=all>., di akses pada tanggal 03 Januari 2022

SP2010 atau rata-rata bertambah sekitar 140 ribu pertahunnya. Apabila diamati sejak tahun 1971 - 2020 maka selama 50 tahun ini penduduk Lampung telah bertambah lebih dari tiga kali lipatnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung sebesar 1,65 persen pertahun. Terdapat peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,41 persen jika di bandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 1,24 persen.¹⁴.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk dan dampak dari ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya.

Upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sudah di lakukan pada masa orde baru yaitu pada tahun 1967, dengan cara melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) Nasional yang di kerjakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang sudah diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Setelah program KB dinyatakan sebagai program Nasional maka di bentuklah Badan atau Lembaga berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana maka pada tanggal 17 Oktober 1968 di bentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), kemudian berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 di bentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga

¹⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2020

Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.¹⁵

Dalam mendukung kinerja BKKBN untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, maka Presiden RI memberikan amat kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan atau program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2015-2019, kegiatan yang akan dibentuk dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah.¹⁶

Setelah adanya amat dari Presiden RI, maka BKKBN menindaklanjuti amat tersebut dan kemudian membentuk sebuah program yaitu Kampung Keluarga Berencana (KB), kemudian pada tanggal 14 Januari 2016 Presiden RI mencanangkan Kampung KB di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Lalu pada tahun 2017 program ini di laksanakan secara Nasional di mana dalam satu kecamatan wajib memiliki satu Desa/Kelurahan sebagai Kampung KB.¹⁷ Syarat atau indikator wilayah yang akan menjadi Kampung KB adalah jumlah keluarga miskin di atas rata-rata, wilayah yang kumuh, daerah pesisir/nelayan, daerah aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industry, kawasan wisata, dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.¹⁸

Masyarakat Kelurahan Korpri Jaya mayoritas masyarakatnya kelas menengah kebawah, selain itu pemukiman yang padat dan jumlah penduduk yang cukup padat sehingga banyak masyarakatnya yang hanya bermata pencaharian sebagai buruh.¹⁹

¹⁵Sejarah BKKBN,(On-Line) website BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>, di akses pada tanggal 03 Januari 2022

¹⁶Pedoman Pengelolaan Kampung KB, *Dokumentasi*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, h. 1

¹⁷ Pedoman Pengelolaan Kampung KB, *Dokumentasi*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, h. 2

¹⁸ Pedoman Pengelolaan Kampung KB, *Dokumentasi*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, h. 17

¹⁹ Kelurahan Korpri Jaya, *Observasi*, 05 Januari 2022

Hal ini terlihat dari tempat tinggal mereka yang sederhana dan ada beberapa masyarakat yang masih menyewa rumah untuk tempat tinggal.²⁰ Selain itu pemikiran masyarakat yang awam atau masih berpegang teguh pada keyakinan terdahulu yaitu banyak anak banyak rezeki membuat tingkat kelahiran di Kelurahan Korpri Raya cukup tinggi dari pada kelurahan lain yang ada di Kecamatan Sukarame.²¹ Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap program KB atau menjaga jarak antara anak satu dengan yang lain, kurangnya kesadaran keluarga dalam menjaga lansia, kurangnya kesadaran keluarga terhadap tumbuh kembang anak, kurangnya pengetahuan keluarga terhadap tumbuh kembang remaja.²² Melihat permasalahan tersebut maka BKKBN memilih kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame untuk membentuk Kampung KB, agar dengan adanya kampung KB di Kelurahan Korpri Jaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi keluarga atau masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya.²³

Setelah terbentuknya Kampung KB Sakura di Kelurahan Korpri Jaya, masyarakat di berikan penyuluhan serta sosialisasi terkait balita, remaja dan lansia sebagai mana program BKKBN dalam penyuluhan di Kampung KB yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (pelayanan informasi dan Konsling Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Sasaran dalam program yang dicanangkan oleh BKKBN adalah keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia, karena fokus utamanya adalah menyadarkan dan memberikan pengetahuan kepada keluarga sehingga keluarga memiliki pengetahuan yang dapat bermanfaat dan dapat mensejahterakan keluarga.²⁴ Dampak dari adanya kampung KB Sakura adalah masyarakat merasa terbantu terait KB, masyarakat dapat

²⁰ Kelurahan Korpri Jaya, *Observasi*, 05 Januari 2022

²¹ Kelurahan Korpri Jaya, *Observasi*, 05 Januari 2022

²² Niniek Widayanti, *Pendamping PLKB Sakura, wawancara*, pada tanggal 29 November 2021

²³ Niniek Widayanti, *Pendamping PLKB Sakura, wawancara*, pada tanggal 29 November 2021

²⁴ Niniek Widayanti, *Pendamping PLKB Sakura, wawancara*, pada tanggal 29 November 2021

melaksanakan program kehamilan, masyarakat merasa nyaman dan masyarakat sadar bahwa dua anak lebih baik.²⁵

Melihat latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat di kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dan pengetahuan keluarga.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelitian yang dilakukan supaya masalah dapat difokuskan terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Maka fokus penelitian ini adalah Kemitraan Antara Masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat melalui Kampung KB Sakura dengan kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konsling Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) di Kelurahan Kopri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat melalui kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konsling Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) di Kelurahan Kopri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah: “Untuk mengetahui Kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat

²⁵ Maryati, *Kader Kampung KB Sakura*, wawancara, pada tanggal 02 Februari 2022

melalui kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konsling Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) di Kelurahan Kopri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung !”

F. Manfaat Penelitian

Dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan masyarakat.
 - b. Sebagai studi pengembangan masyarakat yang mempelajari ilmu sosial di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat atau lembaga yang berkaitan dengan kemitraan dalam pengembangan masyarakat.
 - b. Menambah wawasan pengetahuan dan sebagai masukan informasi bagi yang akan melakukan penelitian yang lebih jauh tentang kemitraan khususnya dalam pengembangan masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka didalam penulisan ini sangatlah diperlukan untuk menjadikan sebuah penulisan ada tidaknya suatu persamaan ataupun perbedaan dalam teori yang digunakan dalam pendekatan maupun metode dalam pengumpulan data dan kesimpulan yang dikaji. Untuk menghindari kesamaan, peneliti melakukan pencarian terhadap karya ilmiah terdahulu, penulis menemukan karya ilmiah skripsi yang memiliki kesamaan judul yang akan penulis teliti yaitu:

1. Nur Ikhsan dalam penelitian yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makassar”²⁶
Dalam penelitian tersebut berfokus mengenai kemitraan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat, sedangkan pada penelitian penulis terfokus tentang bagaimana program kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN untuk mencapai kesejahteraan sosial.
2. Skripsi Eren Harikasenda, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kampung KB Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun ajaran 2018.”²⁷ Menurut penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini, yaitu bahwa hasil penelitian terdahulu menunjukkan kebijakan tentang Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan masih terdapat permasalahan yang menjadi kendala kurang optimalnya, pertama Ketersediaan biaya operasional, bahwa pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan ketersediaan dana operasional masih perlu ditingkatkan lagi mengingat pentingnya pengaruh terhadap motivasi kerja di lapangan. sedangkan pada penelitian penulis terfokus tentang bagaimana program kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN untuk mencapai kesejahteraan sosial.

²⁶ Nur Ikhsan, *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makassar*, (Makassar : skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

²⁷ Eren Harikasenda, *Analisis Implementasi Kampung KB Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan, 2018

3. Wahyuningsih, dalam penelitian yang berjudul “Kerjasama Antara Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Kab. Gowa”²⁸.

Dalam penelitian tersebut berfokus mengenai kerjasama antara lembaga dengan pelaksana dan didalamnya membahas tentang KB, tentang laju pertumbuhan penduduk, sedangkan pada penelitian penulis terfokus tentang bagaimana program kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN untuk mencapai kesejahteraan sosial.

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini akan mengurai metode penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola hukum tertentu menurut hukum logika.²⁹ Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data dilapangan.³⁰ Karena itu pada dasarnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggali data yang sumbernya dari lokasi atau tempat penelitian, sehingga metode tersebut akan menghasilkan informasi-informasi mengenai kegiatan Kemitraan Antara Masyarakat dengan BKKBN dalam Pengembangan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

²⁸ Wahyuningsih, *Kerjasama Antara Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Kab. Gowa*, (skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu politik Prodi Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 15

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung:madar Maju), h.17.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif memandang kenyataan sebagai konstruksi sosial, individu atau kelompok menarik atau memberi makna kepada suatu kenyataan dengan mengkonstruksinya.³¹ Orang membentuk konstruksi untuk mengerti kenyataan-kenyataan dan dia memahami konstruksi sebagai suatu sistem pandangan, persepsi atau kepercayaan. Persepsi seseorang adalah apa yang ia yakini sebagai “nyata” baginya, dan terhadap hak itulah tindakan, pemikiran dan perasaannya diarahkan.

Jika dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan memberikan interpretasi”.³²

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Adapun yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Kemitraan Antara Masyarakat dengan BKKBN dalam Pengembangan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

³¹ Ustman Ali, *Pengertian Penelitian Kualitatif Dan Tujuannya*, On-line dapat dilihat di <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-tujuannya.html>, diakses pada tanggal 02 November 2021

³² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Semarang: PT Bumi Aksara, 1991), h. 44

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Partisipan adalah orang-orang atau manusia yang berpartisipasi ikut serta dalam suatu kegiatan. Menurut pendapat dari Sumarto partisipan adalah cara pengambilan keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan tenaga, pikiran maupun materi dan tanggung jawabnya terhadap perolehan keputusan yang telah diambil supaya tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.³³

Dengan demikian bahwa partisipan merupakan subjek yang dilibatkan didalam kegiatan emosi dan mental secara fisik sebagai bagian peserta dalam memberikan jawaban terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Partisipan disini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh Kader kampung KB sakura dan Masyarakat kampung KB Sakura.

Sampel adalah sebagian tertentu yang diambil dari sesuatu jumlah populasi yang akan diteliti secara rinci.³⁴ Nana sudjana berpendapat bahwa sampel adalah wakil dari populasi.³⁵ Demikian dapat dipahami bahwa sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini adalah cerminan dari populasi guna menggambarkan keadaan yang sifatnya akan diukur dan untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian.

Disini penulis menggunakan metode non-random sampling pada penelitian ini dengan jenis sampel *purposive sampling* yaitu dengan memilih sekelompok subyek yang mendasari atas ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki sangkutan yang erat hubungannya dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁶

³³ Sumarto dan hetifah sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Geornance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003, h. 17

³⁴ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 57

³⁵ Nana Sudjana, *Pedoman Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 53

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, h. 174

Dalam menentukan sampel harus dengan pertimbangan tertentu atau melakukan seleksi khusus, adapun kriteria yang ditetapkan sebagai kriteria oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Kader kampung KB Sakura
 - 1) Ketua PLKB sakura
 - 2) Sekertaris PLKB sakura
 - 3) Bendahara PLKB sakura
- b. Masyarakat
 - 1) Masyarakat kelurahan korpri jaya
 - 2) Tokoh masyarakat kelurahan korpri jaya
 - 3) Masyarakat yang rajin mengikuti kegiatan program kampung KB sakura

Berdasarkan kriteria yang berada diatas penulis menetapkan sampel sebanyak 3 orang dari Kader Kampung KB Sakura dan 5 orang dari masyarakat, jadi jumlah keseluruhan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Salah satu langkah yang penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dan relevan, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.³⁷

Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

³⁷Kartono Kartini, *Pengantar Riset Sosial*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 1996), h. 49

terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.³⁸ Penelitian menggunakan observasi Non partisipan yang mana observasi dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Observasi yang penulis lakukan meliputi, pertama observasi tempat (*place*) yaitu kampung KB sakura, selanjutnya kedua observasi kepada orang-orang atau masyarakat (*people*) pengurus Kampung KB sakura dan masyarakat yang mengikuti program kegiatan, ketiga observasi kegiatan (*activity*) seperti koordinasi, advokasi, KIE & Konseling, penyuluhan, sosialisasi, kunjungan rumah, kegiatan program yang dilakukan oleh pengurus kampung KB Sakura.

b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.³⁹ Wawancara-wawancara seperti itu tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Dalam pelaksanaan interview menggunakan interview bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan bebas kepada interviewer. Jadi yang dimaksud adalah pedoman (interview guide) yang menjadi catatan-catatan pokok yang telah diarahkan kepada persoalan. Sehingga diharapkan wawancara yang dilakukan lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendalam.⁴⁰ Peneliti melakukan interview kepada partisipan untuk menggali data yang akurat. Metode interview sangat penting untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data-data yang akurat dalam

³⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h. 98

³⁹Marzuki, *Metodologi Riset*, *Op.cit.*, h. 66

⁴⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.cit.*, h. 67

penelitian ini dapat diperoleh, yakni perasaan, pengalaman, pengetahuan terkait kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari sebuah data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, dan sebagainya.⁴¹ Penulis menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dan tentunya langsung kepada pokok bahasan. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Dengan adanya teknik dokumentasi, peneliti dapat berupaya mengumpulkan data terkait struktur Kampung KB Sakura dan program atau kegiatan kampung KB sakura.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.⁴² Menurut Mileas dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Emzir mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Emzir mengemukakan, Reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar,

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metode research* (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973), h. 131

⁴² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 85

yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana hendak dibuang.

Penulis melakukan memilah dan menelaah secara dalam keseluruhan data yang dihimpun dilapangan mengenai kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat di kelurahan korpri jaya sukarama kota Bandar Lampung, setelah data terkumpul kemudian data direduksi dengan memilah dan merangkum hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Emzir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang terus memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian penulis dapat menentukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari sekumpulan informasi-informasi dalam proses penelitian.

Setelah dilakukan reduksi data maka langkah berikutnya adalah mendisplay data dengan penyajian data kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat di kelurahan korpri jaya sukarama kota Bandar Lampung, dan peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga dapat mudah dipahami.

c. Vertifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/vertifikasi dari suatu data. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan

pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.⁴³

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data., yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

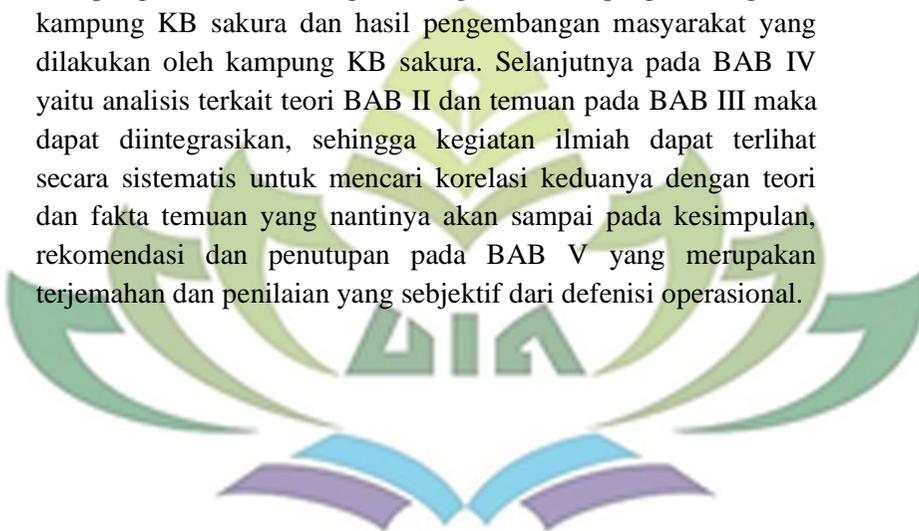
I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam ini bisa penulis maksudkan pada BAB I yang terdiri dari beberapa komponen seperti penulisan penegasan judul kemudian penulisan latar belakang masalah dengan adanya masalah rendahnya keikutsertaan masyarakat terkait program kegiatan kampung KB sakura maka dilakukanlah dengan melakukan pendampingan oleh pengurus kampung KB sakura dengan melihat fokus dan subfokus penelitian maka timbulah pertanyaan serta rumusan masalah yaitu Bagaimana kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat di kelurahan korpri jaya sukarama kota Bandar Lampung?, dengan tujuan agar mengetahui kemitraan antara masyarakat dengan BKKBN dalam pengembangan masyarakat yang dapat menimbulkan manfaat bagi masyarakat agar menjadi keluarga yang berkualitas , mandiri dan sejahtera

⁴³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*, h. 195

dengan tetap menggunakan kajian penelitian yang terdahulu agar dijadikan referensi serta pembaruan bagi peneliti yang akan datang, dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat menjadikan acuan. Pada BAB II terkait dengan teori kemitraan, teori BKKBN, teori pengembangan masyarakat dan teori lainnya sebagai referensi dalam menganalisis temuan yang ada di lapangan.

Pada BAB III yaitu hasil temuan dilapangan, berdasarkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diperoleh berupa Gambaran Umum atau Profil Kelurahan Korpri Jaya, Profil Kampung KB Sakura, penyuluhan yang dilakukan pengurus Kampung KB sakura, kegiatan-kegiatan atau program kegiatan kampung KB sakura dan hasil pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh kampung KB sakura. Selanjutnya pada BAB IV yaitu analisis terkait teori BAB II dan temuan pada BAB III maka dapat diintegrasikan, sehingga kegiatan ilmiah dapat terlihat secara sistematis untuk mencari korelasi keduanya dengan teori dan fakta temuan yang nantinya akan sampai pada kesimpulan, rekomendasi dan penutupan pada BAB V yang merupakan terjemahan dan penilaian yang subjektif dari defenisi operasional.



BAB II

KEMITRAAN MASYARAKAT DENGAN BKKBN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan mempunyai banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *mitra* memiliki arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dan menengah maupun besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah maupun besar dengan memperhatikan suatu prinsip yang saling memerlukan, saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan satu sama lain.²

Menurut Tugimin dalam kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan melakukan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.³

Dalam penemuan menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara kedua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam suatu kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya akan tetapi membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam suatu pembangunan guna kesejahteraan rakyat.⁴

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 588

²Jeane nelje saly, usaha kecil, *penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), h. 35

³Tugimin, *kewarganegaraan*, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004), h. 7

⁴Jeane neltje saly, *Op.cit.*, h. 35

Kemitraan dapat dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai belah pihak, baik secara individual maupun kelompok. Notoatmodjo mengatakan kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu maupun kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁵

Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dari dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan suatu prinsip yang saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁶

Menurut Lan Lion bahwa kemitraan adalah suatu sikap menggerakkan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana ada pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.⁷

Louis E. Boone dan David L. Kurtz mengatakan bahwa kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan aplikasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama yakni saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan kemitraan sebagai suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Kunci utama dalam kemitraan adalah dengan menerapkannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada seluruh program-program dengan lembaga-lembaga maupun tokoh yang berada dimasyarakat terkait yang berpartisipasi dalam sebuah kemitraan serta menerapkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sebuah kemitraan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu

⁵Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 30

⁶Mohammad jafar hafsah, *kemitraan usaha*, (Jakarta: sinar harapan 2000), h. 10

⁷Linton L. *Partnership Modal Ventura*. (Jakarta: PT.IBEC, 1995), h. 8

⁸ Louis E. boone, David L. kurta: ahli bahasa, Fadriansyah Anwar, Harjono Honggomiseno, pengantar bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 21

kesetaraan antara pihak-pihak tersebut (*equality*) dalam hal visi dan misinya dalam mencapai tujuan terutama adanya keterbukaan atau *trust relationship* antara pihak-pihak tersebut (*transparency*) dan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang berhubungan yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat (*mutual benefit*). Berdasarkan halini maka dapat diambil rumusan bahwa syarat-syarat dalam menjalin sebuah hubungan kemitraan yang baik akan terjadi apabila :

- a. Adanya dua pihak atau lebih
- b. Memiliki kesamaan visi dan misi dalam mencapai suatu tujuan
- c. Adanya kesepakatan dan
- d. Saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.⁹

Secara umum, di dalam kemitraan model kemitraan dikelompokkan menjadi dua, menurut *Mone dkk*, yaitu pertama, model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaringan yang masing-masing memiliki mitra tersendiri melalui perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Adanya sebuah jaringan karena mempunyai kesamaan dalam pelayanan atau karakteristik lainnya. Dalam model kemitraan yang kedua dapat digolongkan kemitraan yang baik sebab dalam mitra mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap program yang dilakukan bersama. Didalam visi dan misi dalam kegiatan kegiatan sehingga tercapainya tujuan kemitraan yang direncanakan serta terlaksanakan dengan baik, dan apabila adanya sebuah kesalahan maka dievaluasi secara bersama. Program kemitraan melalui keterkaitan untuk mengatur sebuah hubungan kerjasama keterkaitan antara masyarakat dengan lembaga.¹⁰

⁹Herlina, *Urgensi Kemitraan Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal*, jurnal kemitraan

¹⁰James dan akrasana, *Aspek-Aspek Finanical Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta:LP3ES, 1993), h. 20

Didalam kemitraan terjadi relasi antara *organisasi dengan relasi yang akan terciptanya kerja sama*. Dalam kemitraan terdapat sebuah kepercayaan, yakni pertama adanya persamaan dan organisasi yang lebih landau. Kedua mempunyai hierarki aktualisasi yang sangat luwes dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai. Ketiga spritualitas yang berbasis alamiah. Keempat tingkatan kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem dan terakhir persamaan dan keadilan gender.¹¹

Kemitraan untuk pengembangan masyarakat bersama pemerintah menjadi bagian yang penting dalam *good governance*. Pemerintah diposisikan sebagai fasilitator sedangkan yang bertugas untuk pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen Negara termaksud dunia usaha dan masyarakat agar menjadi terbentuk kemitraan yang sangat ideal antara pemerntah, masyarakat maupun pihak swasta. Dengan demikian konsep *governance* merujuk pada tiga pilar utama yaitu *public governance, corporate governance* dan *civil society*.¹² Bagi masyarakat menerima peran dan posisi yang ideal dibidang pemerintahan dan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Posisi yang menjadikan sebagai mitra yang berimbang hanya dapat terwujudkan dengan melalui proses pemeahan disegala segi termaksud konsekuensi untuk memberdayakan masyarakat sipil.

Dalam kemitraan yang menjadikan sebagai pengembangan masyarakat memiliki fungsi dalam pembangunan sebagai upaya untuk merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat, yang dimaksud adalah pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah. Maka dari itu pendekatan fungsi kemitraan ini adalah

- a. Yang pertama yakni untuk menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang baik diperlukan ide yang

¹¹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta, gava media: 2004), h. 121

¹² Ambar Teguh Sulistiyani, *Ibid.*, h. 137

- inovasi hendaknya dilakukan oleh anggota masyarakat dengan pertimbangan aspek-aspek lokal.
- b. Kedua yakni masyarakat diajarkan mandiri dan dapat mengimplementasikan suatu hasil yang direncanakan sebelumnya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
 - c. Ketiga yaitu dengan memanfaatkan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil pembangunan juga dilakukan dalam sistem sosial masyarakat dimana mereka tinggal.¹³

Kemitraan masyarakat yang berperan membantu aparat yang berguna untuk lebih memahami daerahnya dan menangkap peluang-peluang pengembangan yang tersedia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan yang melibatkan masyarakat tidak terlihat bahwa pengembangan yang dilakukan bukan sebuah batuan uang dari pihak luar, namun ia lebih menekankan pada kerjasama antara pihak didalam wilayah termaksud pemerintah, dan pentingnya arus informasi, saran dan tanggapan yang terkait dari pihak-pihak tersebut yang dapat memberikan proses berjalannya pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Kemitraan yang melibatkan masyarakat dengan lembaga pemerintah mendapatkan bagian pembagian tugas dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah melakukan menjalankan program yang sudah dirancang untuk di dalam kampung keluarga berencana (KB) dengan menerapkan 8 fungsi keluarga yakni

- a. Fungsi Keagamaan.
- b. Fungsi Sosial dan Budaya.
- c. Fungsi Cinta Kasih.

¹³Sulaeman, *kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengawasan aktivitas penambang pasir di desa buareng kecamatan kajuara kabupaten bone*

¹⁴Masturi, Beatrix, *Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat Dan Perwujudan Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata* (Sulawesi Barat 2017), h. 71

- d. Fungsi Perlindungan
- e. Fungsi Reproduksi
- f. Fungsi Sosialisasi
- g. Fungsi Ekonomi
- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan.

2. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pengembangan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan disamping itu agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang kesejahteraan sosial yang telah dituangkan kedalam program yang di rancang oleh BKKBN yang di tuangkan kedalam kampung Keluarga Berencana (KB) dengan melakukan 8 fungsi keluarga yang menyangkut kesejahteraan sosial.¹⁵

Hafsah mengemukakan secara umum tujuan dari kemitraan adalah untuk:

- a. Meningkatkan peranan dan pengembangan masyarakat
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
- c. Mempertahankan ketahanan ekonomi nasional
- d. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

Secara khusus tujuan kemitraan dapat dilihat dari berbagai aspek dari melihat berbagai aspek sebagaimana diungkapkan oleh *Hafsah* bahwa tujuan suatu kemitraan itu ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam melihat pelaksanaan kemitraan *pada aspek ekonomi* merupakan untuk meningkatkan pendapatan. Maka tujuan kemitraan pada ekonomi yang berkaitan dengan efisiensi. *Pada aspek sosial budaya* kemitraan usaha dirancang sebagai

¹⁵M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000), h. 109

bagian dari upaya dalam pemberdayaan bagi masyarakat. Adapun tanggung jawab kemitraan yang dilakukan pemerintah yakni melakukan pembinaan pada masyarakat dan melakukan bimbingan terhadap program yang sudah ada. Pembinaan dan bimbingan dilakukan dengan maksud agar masyarakat tangguh dan mandiri terhadap kesejahteraan sosial.¹⁶

B. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

1. Pengertian BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu lembaga non kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.¹⁷

Dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang jelas memuat kedudukan, tugas, organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dan selain itu dalam pembiayaan lembaga ini telah diatur oleh Undang-Undang, maka peralihan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dapat meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk dan penyelenggara keluarga berencana.¹⁸

Tugas pokok BKKBN mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan peyelenggaraan keluarga berencana.¹⁹ Dalam filosofi BKKBN adalah menggerakkan peran serta masyarakat

¹⁶Herlina, *Urgensi Kemitraan Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal*, jurnal kemitraan

¹⁷Dwi Listyawati, *Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB)*

¹⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia No 62 Tahun 2010

¹⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia No 62 Tahun 2010, *Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional,2010), h. 3

dalam keluarga berencana. *Grand strategi* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yakni :

- a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat
- b. Menata kembali pengelolaan program kampung berencana
- c. Memperkuat SDM dalam operasional program
- d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan program
- e. Meningkatkan pembiayaan

Nilai-nilai yang terkandung di sebuah *grand strategi* adalah integritas, energik, professional kompeten, partisipatif, konsisten, organisasi pembelajaran, kreatif maupun inovatif. Dengan adanya kebijakan dalam *grand strategi* adalah suatu pendekatan pemberdayaan, pendekatan desentralisasi, pendekatan pada kemitraan, pendekatan kemandirian, pendekatan segmentasi terhadap sasaran, pendekatan lintas sektor.

Dalam strategi BKKBN terhadap program Kampung Keluarga Berencana (KB) yakni :

- a. Re-Establishment merupakan membangun kembali sendi-sendi program kampung KB nasional sampai menuju tingkat lini lapangan pasca penyerahan kewenangan.
- b. Sustainability adalah memantapkan komitmen program dan kesinambungan dukungan oleh segenap *stakeholders* dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Dalam mewujudkan tugasnya BKKBN memiliki beberapa fungsi :

- a. Lembaga yang merumuskan kebijakan nasional, pemandu dan sinkronisasi kepada kebijakan dalam bidang kampung KB.
- b. Lembaga yang melaksanakan proses advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk.

- c. Lembaga yang mengolah tenaga penyuluh (petugas lapangan) KB.
- d. Lembaga yang melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Lembaga yang melakukan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas kampung KB.

Selain itu dalam melaksanakan fungsinya BKKBN juga memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang Kampung KB.
- b. Melakukan pembinaan dan melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas administrasi umum dilingkungan BKKBN.
- c. Menyampaikan sebuah laporan, saran, dan pertimbangan terhadap bidang kampung KB.

2. Kampung Keluarga Berencana (KB)

Amanat Presiden Republik Indonesia kepada lembaga BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan atau sebuah program yang **mendapatkan memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019**. Kampung KB mencoba memadukan dalam konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program tersebut dapat bersentuhan dengan langsung dan memberikan suatu manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana atau yang sering disebut Kampung KB.²⁰

²⁰ Pedoman Pengelolaan Kampung KB (BKKBN TAHUN 2017)

Kampung KB adalah satuan setingkat RW, dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.²¹ Dibentuknya program kampung KB memiliki suatu tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan lintas sektor untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah daerah, lembaga non kementerian dan swasta berperan terdiri dalam fasilitas, pendampingan dan pembinaan.²²

Mukti mengemukan keluarga berencana adalah sebagai upaya ikhtiar untuk memberikan jaminan kesehatan, untuk sang anak maupun ibu, jaminan pendidikan merupakan bekal yang sangat berharga untuk kehidupan kelak dalam masyarakat, untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran dalam keluarga lahir dan batin.

3. Tujuan dan Sasaran Kampung KB

Adapun tujuan dari Kampung KB dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

a. Tujuan Umum

Dilihat secara umum, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program KKBPK serta pembangunan lintas sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan Khusus

Dilihat secara khusus, kampung KB dibentuk untuk meningkatkan peran serta pemerintahan,

²¹ Pedoman Pengelolaan Kampung KB BKKBN tahun 2017

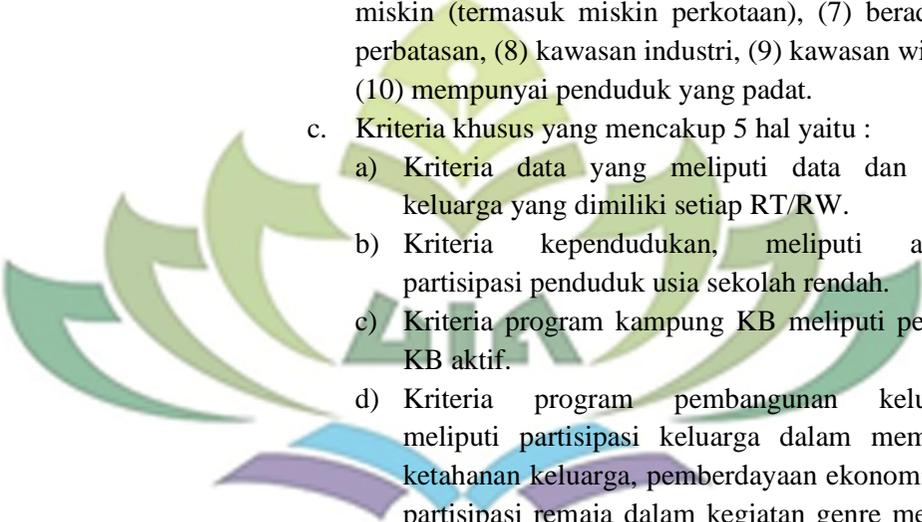
²² Kampungkb.bkkbn.go.id di akses tanggal 02 desember 2021

lembaga non pemerintah dan swasta dalam mendampingi dan membina serta memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan program KKBPK dan pembangunan dalam lintas sektor terkait, memberikan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan jumlah KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih, meningkatkan kualitas keimanan terhadap para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah atau ceramah keagamaan) di kelompok remaja, meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta terhadap rasa kebangsaan dan mencintai tanah air para remaja atau mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya.²³

Syarat dibentuknya kampung KB disuatu wilayah, pada dasarnya ada tiga hal pokok yang menjadikan bahan pertimbangan yaitu : tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dan adanya partisipasi masyarakat yang aktif.

Dalam pemilihan dan penentuan wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB, memiliki tiga kriteria yang akan dipakai :

²³ Pedoman Pengelolaan Kampung KB BKKBN tahun 2017

- 
- a. Kriteria Utama yakni mencakup dua hal :
 - 1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) diatas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa atau kelurahan di kampung tersebut.
 - 2) Jumlah peserta KB berada dibawah rata-rata dalam pencapaian peserta KB tingkat desa atau kelurahan dilokasi kampung KB tersebut.
 - b. Kriteria wilayah mencakup 10 kategori wilayah yang dapat memilih salah satu kriteria wilayah berikut : (1) wilayah yang kumuh, (2) wilayah pesisir, (3) berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) wilayah yang terpencil, (6) kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), (7) berada di perbatasan, (8) kawasan industri, (9) kawasan wisata, (10) mempunyai penduduk yang padat.
 - c. Kriteria khusus yang mencakup 5 hal yaitu :
 - a) Kriteria data yang meliputi data dan peta keluarga yang dimiliki setiap RT/RW.
 - b) Kriteria kependudukan, meliputi angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
 - c) Kriteria program kampung KB meliputi peserta KB aktif.
 - d) Kriteria program pembangunan keluarga meliputi partisipasi keluarga dalam membina ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan genre melalui PIK-R yang masih rendah.
 - e) Kriteria program pembangunan dalam lintas sektor yang mencakup setidaknya empat bidang yakni bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pemukiman dan lingkungan dan program lainnya yang bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi dan perkembangan di suatu wilayah kampung KB.²⁴

²⁴ Pedoman Pengelolaan Kampung KB

Sasaran kegiatan merupakan suatu subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada kampung KB yaitu keluarga, remaja, Penduduk Lanjut Usia (Lansia), Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga yang memiliki Balita, keluarga yang memiliki remaja serta memiliki keluarga yang memiliki lansia, dan sasaran sektor sesuai dengan tugas di masing-masing bidang. Pelaksanaannya adalah Kepala Desa atau Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Penyuluh KB, Petugas lapangan sektor terkait, kader Institut Masyarakat Pesesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Melalui Kampung KB ini diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lintas sektor lainnya dapat berjalan secara terpadu dan terintegrasi dan bersinergi. Sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Pembangunan kependudukan akan lebih baik jika dimulai dari wilayah pinggiran yaitu kampung. Adapun agenda prioritas yang ke 5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia” dan agenda prioritas yang ke 8 yaitu “melaksanakan revolusi mental karakter bangsa”. Dalam dimensi pembangunan manusia diperlukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.²⁵

C. Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat

²⁵Pedoman Pengelolaan Kampung KB BKKBN tahun 2017

memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.²⁶ Pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.²⁷

Pengembangan masyarakat adalah upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama. Maka dari itu, pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.²⁸

2. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (disinterest). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampilkan nilai-nilai dan mengartikulusikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.
- b. Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak

²⁶Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4

²⁷Zubaedi, *Ibid.*, h. 6

²⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 38

menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.²⁹

3. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota

²⁹*Ibid.*, h. 37-40.

- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal
- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif
- l. Mengurangi angka pengangguran
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga grass roots.
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga grass roots.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- r. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

4. Model-Model Pengembangan Masyarakat

Tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu :

- a. Pengembangan masyarakat lokal (locality development)
 Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta

inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

b. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi).

c. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources) dan pengambilan keputusan (distribution of decision making). Pendekatan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin sebab dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (equality) dan keadilan (equity).³⁰

³⁰Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*, h. 42-44.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ayub M. Pandangan dalam bukunya mengatakan Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ketiga tahapan itu adalah tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan :

- a. *Tahap penyadaran* yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
- b. *Tahap pengkapasitasan (capacity building)* atau *memampukan (enabling)* yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), fasilitas (*facilities*), organisasi (*group*) dan sistem nilai aturan main (*norm*).
- c. *Tahap pendayaan (empowerment)* yaitu dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang mereka telah miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.³¹

Totok Mardikanto juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain yakni:

a. Seleksi wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisai merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat.

³¹Ayub. M. Pandangan, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari, Unhalu Press, 2011), h. 33

melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah dikomunikasikan.

c. Proses pemberdayaan masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, meliputi: memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah, Identifikasi alternatif pemecahan masalah, identifikasi sumberdaya yang tersedia, pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok
- 4) Memantau proses hasil kegiatan secara terus menerus

d. Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.³²

³² Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Op.Cit.* h. 122

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematrika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, cet. Ke II Jakarta: CSD, 2008
- Akhmad Nasrudin, *kota bandar lampung dalam angka 2021*
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta, gava media: 2004
- Meiry Afriska, *pengawasan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Tulang Bawang Barat*, 2017
- A. Rahmad Rosyadi, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* Bandung: Pustaka, Salman Institut Teknologi Bandung, 1986
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997
- Dwi Listyawati, *Pedoman Pengelolahan Kampung Keluarga Berencana (KB)*
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Eren Harikasenda, *Analisis Implementasi Kampung KB Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan, 2018

James dan akrasana, *Aspek-Aspek Finanical Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta:LP3ES, 1993

Jeane nelje saly, usaha kecil, *penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001

Suharsini Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung, Tarsito, 1995

Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung:madar Maju

Linton L. *Pathnership Modal Ventura*. Jakarta: PT.IBEC, 1995

Louis E. boone, David L. kurta: ahli bahasa, fadriansyah anwar, harjono honggomiseno, pengantar bisnis, Jakarta: Erlangga, 2002

M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000

Marzuki, *Metodologi Riset* , Yogyakarta: Ekonisia, 2005

Masturi, Beatrix, *Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat Dan Perwujudan Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata* (Sulawesi Barat 2017

Mohammad jafar hafisah, *kemitraan usaha*, Jakarta: sinar harapan 2000

Nana Sudjana, *Pedoman Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Nur Ikhsan, *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makasar 2018*

Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Sumarto dan hetifah sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Geornance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003

Sutrisno Hadi, *Metode research* Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973

Undang-undang Republik Indonesia No 62 Tahun 2010, *Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional,2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta.Balai Pustaka

Tugimin, *kewarganegaraan*, Surakarta: cv. Grahadi, 2004

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Jurnal :

Nur Ikhsan, *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makasar 2018*

Kamaluddin, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, Jurnal Hikmah, vol VIII, No 02 Juli 2014

Kampungkb.bkkbn.go.id di akses tanggal 02 desember 2021

Sulaeman, *kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengawasan aktivitas penambang pasir di desa buareng kecamatan kajuara kabupaten bone*

Profil Kampung KB Sakura Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame

Fitri ismail, " pemberdayaan masyarakat program kemitraan pt. telekomunikasi Indonesia (tbk) " jurnal riset dan pkm 3, no,2 (2010) : 130, [Http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13639/6467](http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13639/6467)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Herlina, *Urgensi Kemitraan Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal*, jurnal kemitraan

Pedoman Pengelolaan Kampung KB, BKKBN 2017

Ninik, *Ketua Kader PLKB Sakura, wawancara dengan penulis*

Wahyuningsih, *Kerjasama Antara Lembaga Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Kab. Gowa*, (skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu politik Prodi Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

